



NEWSLETTER AIHSP

edisi OKTOBER 2023

Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) adalah program kemitraan lima tahun (2020-2025) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan sistem keamanan kesehatan nasional Indonesia guna mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit menular yang muncul pada manusia dan hewan serta meningkatkan koordinasi dan kapasitas untuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul.

Australia Dukung Komitmen Indonesia Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030

HALAMAN 1

Menjangkau Kelompok Marjinal dengan Edukasi Kesehatan

HALAMAN 3

Australia Respons Rabies di Indonesia dengan 400,000 Dosis Vaksin

HALAMAN 6

Gerak Cepat Kendalikan Rabies di NTT

HALAMAN 7

Pengendalian Penyakit dan Efisiensi Produksi Ternak untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

HALAMAN 8



Perayaan puncak Hari Rabies Sedunia tahun 2023 terdiri dari serangkaian kegiatan untuk anak-anak.

Australia Dukung Komitmen Indonesia Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030

Rabies masih merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama lintas sektor, khususnya antara layanan kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan dalam mengendalikan penyakit zoonosis untuk mencapai Indonesia bebas rabies pada tahun 2030.

Pada setiap tanggal 28 September setiap tahun, dunia memperingati Hari Rabies Sedunia. Dorongan yang dihasilkan oleh hari peringatan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ini digunakan oleh berbagai negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rabies.

Menyokong hal ini, Kementerian Pertanian, sebagai koordinator aktif Hari Rabies Sedunia 2023, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan koordinasi Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggelar serangkaian kegiatan pada tanggal 7 Oktober 2023 di Gedung Sate, Bandung, untuk mendorong percepatan pengendalian rabies.

Hari puncak perayaan dimeriahkan dengan dialog berjudul “Harmonisasi Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030” dengan para pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pakar komunikasi, Pak Effendi Gozali. Acara ini juga didukung oleh mitra pembangunan internasional termasuk Pemerintah Australia melalui program Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP).

Membuka dialog, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia, Dr. drh. Nuryani Zainuddin, MSi, menyajikan data terkait rabies. “Rabies masih endemik di Indonesia, jadi jika kita melihat, hanya 12 provinsi yang masih bebas rabies.” Dr. Nuryani menambahkan bahwa perawatan bertanggung jawab terhadap hewan penular rabies (Hewan Penular Rabies: HPR) adalah faktor penting dalam pengendalian rabies, terutama vaksinasi hewan. “Kita dapat mengendalikan rabies di Indonesia jika kita dapat mencapai target vaksinasi setidaknya 70 persen dari populasi HPR. Saat ini kita masih berada pada 30-40 persen.”

Mendukung pernyataan ini, Direktur Kesehatan Hewan Masyarakat, drh. Syamsul Ma’arif, M.Sc., mengatakan bahwa peran kesadaran masyarakat juga penting untuk mengendalikan rabies. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk

menunjuk kader siaga rabies (Kader Siaga Rabies: KASIRA). “Sampai saat ini ada lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jambi, dan Kalimantan Timur. Beberapa KASIRA telah dikelompokkan dalam tim siaga rabies, atau TISIRA (Tim Siaga Rabies). Kami juga melakukan kegiatan informasi, edukasi, dan komunikasi terus-menerus, termasuk untuk anak-anak. Pendidikan kesadaran rabies sejak usia dini juga termasuk dalam kurikulum Merdeka Belajar,” tambahnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Indonesia, dr. Imran Pambudi, MPH, yang juga hadir dalam *talk show*, mendorong pentingnya komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rabies dan gigitan dari HPR.

Dr. Imran memberikan contoh kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas kesehatan di wilayah terkait risiko rabies. “Dalam kasus yang terjadi di pulau Timor, misalnya, [orang] mengira wilayah itu steril dari rabies, tetapi ternyata setelah digigit anjing, orang itu meninggal. Tidak hanya masyarakat, bahkan petugas kesehatan tidak sadar,” katanya. “Angka kematian akibat rabies adalah 100 persen. Jadi jika [seseorang] telah didiagnosis rabies dan menunjukkan tiga gejala takut cahaya, takut air, dan takut angin maka dalam seminggu, biasanya mereka akan meninggal.”



Program edukasi rabies untuk anak-anak termasuk kegiatan mewarnai bersama, mencari kata-kata, dan bermain ular tangga.



Dr. drh. Nuryani Zainuddin, MSi, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia membuka sesi dialog “Harmonisasi Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030” pada perayaan WRD 2023 di Bandung.

Dialog diakhiri dengan kesepakatan bahwa konsep One Health lintas sektor akan memainkan peran besar dalam keberhasilan pengendalian rabies di masa depan. Pendekatan ini berguna dalam mendorong vaksinasi hewan, komunikasi risiko, dan keterlibatan masyarakat melalui pendekatan sosial-budaya.

Perayaan puncak Hari Rabies Sedunia tahun 2023 terdiri dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 1 September. Di antaranya, kegiatan edukasi rabies dihadiri oleh lebih dari 5.000 anak sekolah di lima provinsi di wilayah kerja AIHSP yang direplikasi di 15 provinsi lainnya. Pada kesempatan ini, Pemerintah Australia melalui AIHSP juga mendukung sesi kesadaran masyarakat melalui *talk show* dan sesi edukasi interaktif untuk anak-anak di area stan. Program edukasi rabies untuk anak-anak termasuk kegiatan mewarnai bersama, mencari kata-kata, dan bermain ular tangga dan tangga ular dalam kelompok.

Hingga 7 Oktober—akhir perayaan Hari Rabies Sedunia 2023, laporan akhir tentang pelaksanaan vaksinasi rabies serentak mengonfirmasi bahwa lebih dari 33.000 dosis vaksinasi diberikan. Hal ini memecahkan rekor MURI⁵ untuk “Vaksinasi Serentak Terbanyak pada Hewan Penular Rabies”. Acara vaksinasi melibatkan sekitar 226 pusat kesehatan yang tersebar di 131 kabupaten/kota di 20 provinsi, serta 352 klinik praktik mandiri.

Serangkaian program ini untuk mendorong pengendalian rabies di Indonesia juga telah didanai oleh Pemerintah Australia sejak pertengahan 2023 dengan hibah 400.000 dosis vaksin rabies yang didistribusikan di daerah-daerah dengan jumlah kasus tinggi, yaitu provinsi Bali (200.000 dosis) dan Nusa Tenggara Timur (200.000 dosis).

⁵ Museum Rekor Dunia Indonesia

Menjangkau Kelompok Marjinal dengan Edukasi Kesehatan

Pada akhir Agustus 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP), menyampaikan informasi tentang praktik baik yang berhasil dilakukan dalam melakukan edukasi kesehatan kepada kelompok masyarakat marjinal seperti masyarakat miskin, lansia, perempuan yang rentan secara sosial-ekonomi, dan penyandang disabilitas. Kerja sama ini dilakukan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan memberdayakan jejaring Program Kesehatan Keluarga atau PKH.

PKH adalah program bantuan sosial (bansos) bersyarat untuk Keluarga Miskin (KM), yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memfasilitasi keluarga miskin agar memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan bagi keluarga berpenghasilan rendah.



Uji coba panduan diskusi materi Antraks di Kabupaten Sragen, Mei 2023.

Sebanyak 260.995 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tinggal di lima kabupaten/kota (Cilacap, Magelang, Kota Pekalongan, Sragen, dan Pati) telah mendapat pendampingan dari AIHSP. Dilibatkan juga 782 pendamping PKH mengadakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bulanan dengan KPM di desa-desa. Dengan luasnya jejaring PKH dan jangkauannya hingga ke tingkat desa dan dusun, kerja sama dengan PKH menjadi potensi pelaksanaan komunikasi risiko kesehatan yang digagas AIHSP agar langsung menjangkau masyarakat miskin dampingan PKH.

Menurut Koordinator Wilayah PKH Jawa Tengah, Muhammad Arif Rohman Muis, SE, MM, sangat penting untuk menyampaikan informasi terkait risiko kesehatan kepada kelompok masyarakat marjinal. "Masyarakat marjinal jarang sekali mendapatkan informasi. Kalau pun mendapatkannya, seringkali informasinya kurang lengkap. Karena itu, kerja sama AIHSP dan PKH berperan penting sekali," katanya.

Sub Koordinator Jamsos Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Didik Prawata, SE, menyampaikan, "Masyarakat marjinal tidak seperti masyarakat pada umumnya yang dapat mengakses layanan secara mudah dan bebas. Mereka memiliki kendala". Padahal, merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, semua orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

PKH memiliki lima modul utama terkait kesehatan, pendidikan, keuangan keluarga, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial, yang disampaikan dalam P2K2. AIHSP memperkaya modul tersebut dengan menambahkan lima materi sebagai panduan diskusi P2K2 yaitu Vaksinasi COVID-19, Protokol Kesehatan, Antraks, Rabies, dan Leptospirosis. Materi tentang tiga penyakit yang terakhir disebut tadi adalah hal baru bagi pendamping PKH dan KPM. AIHSP menambahkan materi ini untuk mengedukasi tentang pentingnya pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan dari hewan kepada

manusia dan sebaliknya (Zoonosis) serta penyakit menular yang baru muncul.

Plt. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Tegoch Hadi Noegroho, SH menilai bahwa penambahan materi baru sebagai panduan diskusi P2K2 sebagai langkah yang tepat. "Dengan adanya kerja sama ini, kami sangat diuntungkan. Di Jawa Tengah ini, salah satu hal berat yang dihadapi adalah masalah kesehatan hewan, yang berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat di desa-desa. Kita ketahui, sebagian besar masyarakat penerima PKH hidup di desa dan tidak terlepas dari masalah peternakan."

Arif juga menambahkan, "KPM memang berhadapan langsung dengan tikus dansapi, tetapi mereka tidak menyadari penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan tersebut dan bagaimana cara mencegahnya. Karena itu, KPM sangat antusias mendapatkan pengetahuan baru ini."

"Hingga Juli 2023, pendamping PKH telah berhasil menggunakan lima materi panduan ini dalam P2K2 kepada 21.846 KPM, termasuk lansia dan penyandang disabilitas," kata Arif. Ia menjelaskan, lima materi panduan diskusi tersebut dikemas secara sederhana sehingga mudah digunakan.

Kerja sama PKH dan AIHSP dimulai pada Maret 2022. Koordinasi awal diikuti oleh Lokakarya Penyusunan Panduan pada Oktober 2022, dilanjutkan dengan Orientasi Panduan Diskusi pada November 2022, lalu Uji Coba Panduan dalam P2K2 di lima kabupaten/kota selama Mei 2023, dan diakhiri oleh Finalisasi Panduan di awal Juni 2023. Kerja sama antara PKH dan AIHSP dinilai bermanfaat bagi berbagai pihak. "Pendamping PKH telah memperoleh pengetahuan baru," ujar Didik. Ia menambahkan bahwa banyak KPM yang bekerja sebagai petani, peternak atau memelihara hewan. "Oleh karena itu, panduan diskusi tentang Antraks, Rabies, Leptospirosis sangat dibutuhkan dan sangat berguna."



Edukasi tentang Zoonosis dalam P2K2 di Kabupaten Pati.



Uji coba panduan diskusi materi Rabies di Kabupaten Cilacap.

Arif mengatakan bahwa penyampaian lima materi tersebut dalam P2K2 mampu mengubah pola pikir KPM. “Dulu, mereka malas mengupayakan rumah yang sehat, menjaga dan membersihkan hewan ternaknya. Sekarang peduli terhadap kebersihan keluarga, lingkungan, dan ternaknya. Kepala desa dan kepala dusun juga senang dengan adanya panduan ini karena membantu mereka dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat”.

Selama penyampaian lima materi panduan diskusi dalam P2K2, pendamping PKH didampingi oleh petugas kesehatan dari pusat kesehatan hewan (puskeswan) atau Dinas Peternakan dan Perikanan, serta pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pada akhirnya, hal ini mendorong koordinasi antar sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan.

“Kerja sama ini juga menguatkan koordinasi lintas sektor yaitu antara Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan dan Perikanan (Peterikan),” imbuh Arif. Koordinasi ini diharapkan dapat menguatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit zoonosis dan infeksi baru yang muncul. “Kami jadi tahu harus melapor ke mana bila menemukan penyakit Antraks yang dialami KPM, misalnya.”

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Rahmah Nurhayati, SKM, M.Kes menegaskan tentang pentingnya koordinasi ini. “Kita bersama-sama bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kuncinya adalah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi.”

Provincial Coordinator AIHSP di Jawa Tengah, dr. Hartanto Hardjono, M.Med.Sc mengatakan, koordinasi lintas sektor ini sejalan dengan pendekatan yang dipromosikan AIHSP yaitu pendekatan yang mengintegrasikan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan (One Health). “Koordinasi ini bisa berkontribusi dalam edukasi One Health di lingkungan terkecil yaitu keluarga di desa-desa, dusun, atau RW,” ujarnya.

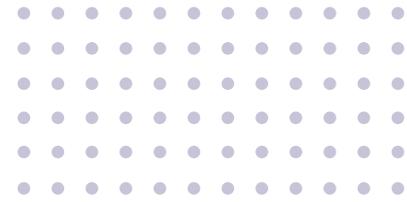
dr. Hartanto berharap, praktik baik ini bisa ditiru oleh kabupaten/kota lain untuk mengendalikan penyakit zoonosis dan penyakit infeksi baru. “Pendamping PKH bisa berperan dalam melakukan Surveilans Berbasis Masyarakat atau SBS,” ucapnya. SBS memberdayakan masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan potensi masalah kesehatan di desa kepada puskesmas dan puskeswan serta melakukan upaya-upaya pencegahan. “Saya optimis bahwa pendamping PKH dan masyarakat yang didampingi PKH bisa dioptimalkan dalam Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM)”. Pernyataannya menguatkan rencana AIHSP untuk menjadikan enam kabupaten/kota (Cilacap, Magelang, Kota Pekalongan, Sragen, Pati, dan Kota Semarang) sebagai wilayah uji coba kegiatan SBM.

Ke depan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berencana memperluas praktik baik kerja sama ini. “Program AIHSP ini bagus. Insya Allah, kami telah mengalokasikan anggaran untuk diseminasi panduan diskusi ini ke 29 kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah,” tegas Didik.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Rudi Agus, S.Sos, MH menutup kegiatan dengan menegaskan kembali tentang pentingnya kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas peternakan, NGO, dan masyarakat, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan hewan.

Diskusi ini merupakan kegiatan berbagi pengetahuan ketahanan kesehatan untuk menyampaikan praktik baik yang telah dihasilkan selama implementasi program AIHSP. “Selama hampir empat tahun pelaksanaan program, AIHSP telah berkontribusi dalam melahirkan praktik-praktik baik di tingkat nasional maupun di daerah. Akan sangat baik bila praktik baik ini dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat membantu provinsi lain dalam melanjutkan pelaksanaan atau mereplikasi pendekatan-pendekatan yang telah berhasil diujicoba,” demikian penjelasan Ibu Lea Suganda, mewakili Direktur Program AIHSP.

Australia Respons Rabies di Indonesia dengan 400,000 Dosis Vaksin



Konsul-Jenderal Australia, Anthea Griffin, secara resmi menyerahkan 400.000 dosis vaksin Rabies anjing dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia di Denpasar, Bali.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Indonesia, Dr Nuryani Zainuddin, mengatakan otoritas kesehatan Indonesia patut diacungi jempol. “Otoritas kesehatan hewan kami mengoordinasikan upaya menggunakan pasokan vaksin Indonesia untuk memvaksinasi lebih dari 89.000 anjing dalam 7 minggu di daerah wabah Bali dan Timor Barat,” kata Dr Nuryani Zainuddin.

“Kemitraan erat dengan Australia dalam kesehatan hewan telah mendukung upaya terkoordinasi Indonesia untuk mengendalikan penyakit ini dan mencegah penyebaran Rabies.”

“Australia bangga mendukung respons Rabies Indonesia, yang menargetkan wabah Rabies langsung,” kata Konsul Jenderal Anthea Griffin. “Saya mengucapkan selamat kepada layanan kesehatan setempat atas pekerjaan luar biasa mereka dalam mengoordinasikan tanggap darurat. Vaksinasi anjing menyelamatkan nyawa manusia, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengendalikan Rabies anjing di mana pun.”

Dari 400.000 dosis vaksin, 200.000 dosis diluncurkan di Bali, dengan 200.000 lainnya digunakan untuk memerangi wabah Rabies darurat di Timor Barat, di mana pemberian vaksin dimulai pada 20 Juli 2023.

Kepala Petugas Veteriner Australia, Dr Mark Schipp, mengatakan kerja sama Australia dengan Indonesia dalam Rabies tidak hanya mendukung teman dan tetangga, tetapi juga membantu menghentikan penyebaran Rabies di wilayah tersebut.

“Lebih dari 99 persen kasus Rabies pada manusia disebabkan oleh gigitan atau cakaran dari anjing yang terinfeksi. Rabies 100% dapat dicegah melalui vaksinasi rutin pada anjing, mencegah penularan ke manusia—terutama anak-anak yang menyebabkan lebih dari 40 persen kematian akibat Rabies,” kata Dr Schipp.

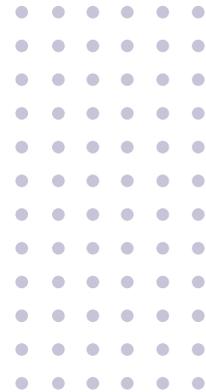
Australia bermitra dengan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, dan Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia Indonesia bilateral untuk mendukung tanggapan Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan Rabies. Vaksin-vaksin dari Australia semakin memperkuat dukungannya untuk pengendalian Rabies di wilayah tersebut, dan komitmennya terhadap pemberantasan penyakit secara global pada tahun 2030.



Australia bermitra dengan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, dan Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) untuk mendukung tanggapan Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan Rabies.



Anak-anak di Kelurahan Cendana TTS sangat bersemangat membawa anjing mereka untuk divaksin anti Rabies.



Gerak Cepat Kendalikan Rabies di NTT

Australia mendonasikan 100,000 dosis vaksin Rabies ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dosis tersebut merupakan bagian dari 201,500 dosis vaksin Rabies yang dialokasikan untuk mendukung respons Pemerintah Indonesia terhadap wabah Rabies baru-baru ini di Pulau Timor, NTT.

Vaksin tersebut merupakan sumbangan dari Masyarakat dan Pemerintah Australia kepada Masyarakat dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk didistribusikan ke Nusa Tenggara Timur khususnya SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT, dan kabupaten berisiko tinggi lainnya di provinsi tersebut.

Australia melalui Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan kantor-kantor Provinsi dan kabupaten dalam mendukung tanggap darurat di NTT, termasuk dengan memberikan pelatihan kepada para vaksinator, mengembangkan kapasitas pengujian laboratorium, memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan tentang manajemen kasus gigitan yang efektif dan mengembangkan serta menyebarkan materi Informasi, Edukasi dan Komunikasi (KIE).

Selain itu, AIHSP juga terus mendukung pengembangan iSIKHNAS, sistem informasi kesehatan hewan nasional, yang dilengkapi untuk memberikan peringatan dini terhadap ancaman yang muncul serta memantau kemajuan dalam tanggap darurat dan pengendalian penyakit. Kasus-kasus yang timbul dari wabah Rabies baru-baru ini di NTT telah dipetakan menggunakan iSIKHNAS, sehingga mendukung penargetan tindakan pengendalian yang efektif ke desa-desa berisiko tinggi.

Kolaborasi One Health yang efisien lintas manusia, hewan, dan sektor terkait untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengendalian Rabies di Indonesia khususnya di NTT. AIHSP mendukung Pemerintah NTT untuk membentuk Satuan Tugas Melawan Rabies (KASIRA) yang akan memainkan peran kunci dalam memperkuat peringatan dini di tingkat masyarakat di mana masyarakat diberdayakan untuk segera melaporkan kasus dan memastikan akses cepat ke layanan kesehatan bagi pasien.

Video rangkaian kegiatan serah terima dan pelatihan tata laksana kasus gigitan HPR di NTT dapat dilihat [di sini](#).



Staf Dinas Peternakan Provinsi NTT, Bpk. Silver Sanu dan Bpk. Rocky menurunkan box penyimpanan Vaksin Rabies untuk dibuka dan diambil Vaksinnya dan segera dimasukkan kedalam cold room Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Pengendalian Penyakit dan Efisiensi Produksi Ternak untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

Oleh: John Weaver, Penasehat Ahli Epidemiologi Kesehatan Hewan, Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP)

Perubahan iklim mengancam setiap aspek kesehatan dan kesejahteraan manusia secara global. Menurut Indeks Risiko Iklim Global, Indonesia mempunyai risiko yang sangat tinggi terhadap perubahan iklim dan menduduki peringkat ke-14 dari 181 negara.¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan peningkatan tajam dalam bencana yang disebabkan oleh meningkatnya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan peristiwa cuaca ekstrim seperti badai dan angin topan. Indonesia harus segera mengurangi kontribusinya terhadap perubahan iklim global dan segera mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungannya untuk

mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan ini ditambah dengan investasi pemerintah yang signifikan dalam pembangunan sosial, telah mengubah kehidupan jutaan orang. Jumlah orang yang kekurangan gizi berkurang setengahnya pada periode 2005-2015 tetapi negara ini terus menghadapi tantangan ketahanan pangan dengan akses yang tidak memadai ke makanan bergizi, malnutrisi yang meluas dan ketidaksetaraan gender – diperkirakan 30% anak balita terus menderita stunting dan seperempat penduduknya menderita anemia.²

¹ Sumber: <https://www.climate-scorecard.org/2023/02/indonesia-a-climate-look-past-and-forward/#:~:text=According%20to%20the%20Global%20Climate,country%20out%20of%20181%20countries>

² Sumber: <https://www.wfp.org/countries/indonesia>

Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) memperkuat sistem kesehatan Indonesia dan produksi peternakan guna meningkatkan keamanan pangan dan ketahanan terhadap penyakit-penyakit baru dan masalah endemik.



Dampak Bencana dan Perubahan Iklim pada Sektor Peternakan



Gambar 1: Bagaimana perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit zoonosis dan juga bagaimana peningkatan risiko penyakit berdampak buruk terhadap ketahanan pangan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menurunkan proporsi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat, serta prevalensi kekurangan gizi dan stunting. Elemen kunci dalam program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan nutrisi yang cukup adalah meningkatkan akses ke diet seimbang berkualitas tinggi termasuk protein hewani dari ternak. Meningkatkan produksi ternak untuk menjadi swasembada di semua produk adalah tujuan utama dari Pemerintah. Namun produksi peternakan di Indonesia menghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim, epidemi dan penyakit hewan endemik, serta kurangnya ketersediaan lahan dan keberlanjutan ekosistem. Luasnya dampak bencana dan perubahan iklim terhadap sektor peternakan diilustrasikan pada Gambar 1 di atas.³

Peristiwa cuaca ekstrim menyebabkan penurunan produktivitas ternak dan kematian. Dampak langsung perubahan iklim terhadap produksi peternakan meliputi tekanan panas, kelembapan, angin, kekeringan dan banjir – yang menyebabkan penurunan produksi susu dan daging, reproduksi yang buruk, dan memburuknya kesehatan hewan.

Penyakit ternak dan zoonosis, yaitu penyakit yang menyebar dari hewan ke manusia, semakin meningkat seiring dengan perubahan iklim dengan meningkatnya penularan penyakit yang ditularkan melalui air (misalnya leptospirosis), perubahan distribusi serangga dan vektor penyakit lainnya (misalnya

Penyakit Kulit Lumpy, Bluetongue, Japanese encephalitis), hewan yang mengalami stres karena menurunnya respon imun dan berkurangnya resistensi terhadap penyakit, dan meningkatnya jumlah masyarakat yang terpinggirkan dan kurang beruntung yang terpaksa melakukan tindakan oportunistik seperti memakan hewan mati (misalnya antraks) dan memperdagangkan hewan yang sakit (meningkatkan penyebaran penyakit semua penyakit menular).

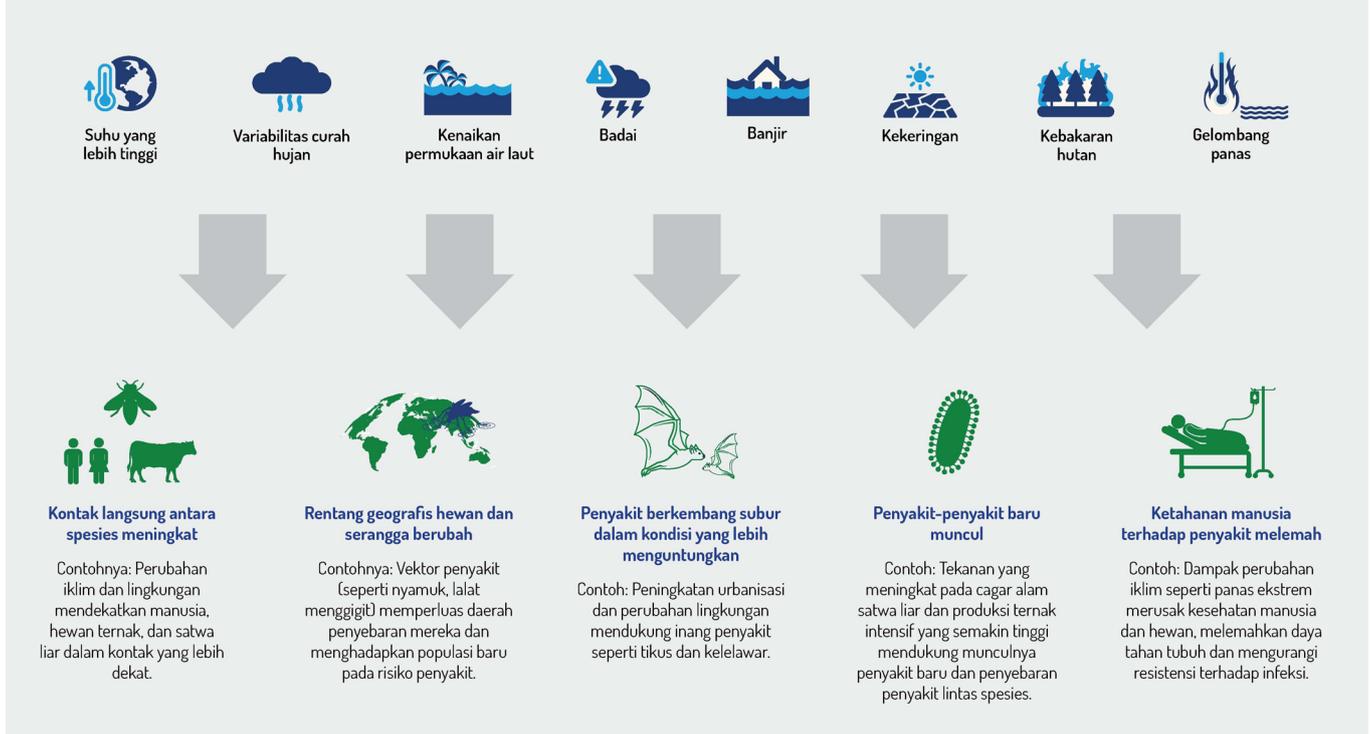
Ketahanan pangan memburuk karena penyakit hewan mempengaruhi ketahanan sektor peternakan dengan berkurangnya efisiensi produksi, meningkatnya biaya, penggunaan sumber daya yang berlebihan dan berkurangnya pasokan dengan biaya yang lebih tinggi. Ketersediaan untuk berinvestasi dalam meningkatkan produksi peternakan menurun, dan mungkin ada upaya untuk melindungi mata pencaharian dengan meningkatkan jumlah ternak dengan meningkatnya dampak lingkungan dan berkurangnya keberlanjutan.

Sistem kesehatan hewan berupaya mengatasi risiko perubahan iklim dengan memfasilitasi sistem produksi ternak yang lebih efisien dan mengurangi beban penyakit hewan dan zoonosis. Dengan meningkatkan efisiensi produksi peternakan, produksi gas rumah kaca dari peternakan akan berkurang dan ketahanan pangan serta keamanan pangan dapat ditingkatkan.

³ Sumber: https://www.eria.org/uploads/media/Books/2019-Towards-a-Resilient-ASEAN-Vol1/10_Disaster-Climate-change-vol.1-Chapter-6.pdf



Bagaimana Perubahan Iklim Menciptakan Lebih Banyak Jalur Penularan Penyakit Zoonosis



Gambar 2: Diadaptasi dari <https://www.cfr.org/article/perilous-pathogens-how-climate-change-increasing-threat-diseases> pangan.

Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) adalah program kemitraan lima tahun (2020-2025) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Tujuan AIHSP adalah untuk meningkatkan sistem ketahanan kesehatan nasional di Indonesia untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan hewan dari penyakit menular yang muncul dan untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan untuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul.

AIHSP bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengendalian penyakit, meningkatkan efisiensi produksi ternak dan mendorong ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana di negara ini. Di bidang kesehatan hewan AIHSP bekerja sama secara nasional dengan Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan di tingkat sub-nasional dengan provinsi dan kabupaten sasaran.

Sistem yang didukung dan kegiatan yang disampaikan meliputi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang risiko penyakit, pelaporan dini dan investigasi wabah, pengujian konfirmasi laboratorium dan opsi kontrol seperti pengobatan, vaksinasi, dan kontrol pergerakan. Yang penting, program-program ini sedang dikembangkan dan dilaksanakan dengan manajemen yang diperkuat menggunakan praktik terbaik 'sistem informasi'.

AIHSP terus mendukung sistem informasi kesehatan hewan nasional, ISIKHNAS, yang menyediakan data inti untuk penilaian risiko dan pengambilan keputusan dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit.⁴ Meskipun fokus AIHSP adalah pada ancaman kesehatan yang muncul dan bagaimana menguranginya, program ini juga memperkuat pengendalian penyakit endemik yang menyebabkan kerugian produksi dan inefisiensi yang sangat signifikan. Mengatasi ancaman penyakit yang muncul dan mengurangi dampak penyakit endemik adalah mempromosikan produksi ternak dan meningkatkan ketahanan pangan untuk Indonesia (lihat Gambar 2).

Selamat Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan 2023!

4 <https://www.isikhnas.com/en>